

RINGKASAN

Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur adanya mekanisme Diversi pada Anak yang berkonflik dengan hukum. Pelaksanaan Diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, usia anak, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat, serta hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Penelitian Kemasyarakatan dalam penentuan kesepakatan Diversi pada Anak yang berkonflik dengan hukum serta kendala apa saja dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam penentuan kesepakatan Diversi pada Anak yang berkonflik dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Lokasi penelitian yaitu di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diolah dengan reduksi data, kategorisasi data, dan display data serta dianalisis dengan cara memahami dan merangkai bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis dan diuraikan dalam kalimat yang teratur, runtut, dan logis, kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Penelitian Kemasyarakatan dalam penentuan hasil kesepakatan Diversi pada Anak yang berkonflik dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto berjalan cukup efektif karena sebagian besar rekomendasi dalam laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan diikuti sebagai hasil kesepakatan Diversi. Kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam penentuan hasil kesepakatan Diversi antara lain terkait aturan batasan waktu penyelesaian Penelitian Kemasyarakatan, belum meratanya pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi Pembimbing Kemasyarakatan, sarana kendaraan dinas dan laptop atau komputer yang belum merata, masyarakat atau korban yang menolak untuk diproses Diversi dan budaya masyarakat yang masih menganggap Diversi hanya menguntungkan pelaku tidak berpihak pada korban, dan sidang di pengadilan masih dianggap satu-satunya tempat untuk mencari keadilan.

SUMMARY

The Juvenile Criminal Justice System provides for a Diversion mechanism for children in conflict with the law. The implementation of Diversion must consider the category of the criminal offence, the age of the child, the support of the family and community environment, and the results of Community Research from the Correctional Centre. This study aims to analyse the effectiveness of Community Research in determining Diversion agreements for children in conflict with the law and what obstacles are faced in the implementation of Community Research as a basis for determining Diversion agreements for children in conflict with the law at the Class II Correctional Center Purwokerto. This research uses an empirical juridical approach method with descriptive analytical research specifications. The research location is at the Class II Correctional Centre Purwokerto. The data sources used are primary data and secondary data. The data is processed by data reduction, data categorisation, and data display and analysed by understanding and assembling legal materials that have been collected and arranged systematically and described in regular, coherent, and logical sentences, then conclusions are drawn. The results showed that the effectiveness of Community Research in determining the results of the Diversion agreement on children in conflict with the law at the Class II Purwokerto Correctional Centre was quite effective because most of the recommendations in the Community Research report were followed as a result of the Diversion agreement. The obstacles faced by Community Supervisors in determining the results of the Diversion agreement include rules related to the time limit for completing Community Research, the unevenness of integrated training in the juvenile criminal justice system for Community Supervisors, uneven facilities for official vehicles and laptops or computers, the community or victims who refuse to be processed for Diversion and the culture of the community that still considers Diversion only benefits the perpetrator and does not favour victims, and court hearings are still considered the only place to seek justice.